ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PRAKTIK TERAPI *CHIROPRACTIC* BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

Ado Rasaki Ananda Yonisawera

Salah satu bentuk upaya pelaksanaan kesehatan di Indonesia adalah jenis layanan pengobatan tradisional termasuk *chiropractic* (kiropraktik). *Chiropractic* adalah sebuah disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada diagnosis, perawatan, dan untuk memanipulasi persendian di tubuh sebagai pencegahan gangguan tulang belakang. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimanakah pengaturan perlindungan konsumen jasa terapi *chiropractic* serta apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pengguna jasa terapi *chiropractic* apabila terjadi kerugian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dan data yang digunakan merupakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan wawancara, serta analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa perlindungan konsumen jasa *chiropractic* sebagai konsumen jasa kesehatan mempunyai hak dan kewajiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana hak dan kewajibannya harus terpenuhi. *Chiropractic* masuk dalam kategori pelayanan kesehatan tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan tradisional diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban pasien, namun karena pasien adalah konsumen jasa kesehatan, maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara menyeluruh. Upaya yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa terapi *chiropractic* ada dua yaitu melalui penyelesaian secara litigasi ataupun non litigasi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yakni melalui mekanisme penyelesaian sengketa di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan salah satunya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Chiropractic, Upaya Hukum